

laporan kinerja

INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2023

BRPPUPP Palembang



Pusat Riset Perikanan

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

TIM PENYUSUN

KEPALA BRPPUPP

KEPALA SUBBAGIAN UMUM

NURWANTI, S.IKOM, M.SI

ACIM TIRTANA, SE

RIAN ARIADI H, S.AP

MUTHIA NURLESTARI PUTRI, S.PI

ARISMANSYAH, S.PI

KATA PENGANTAR

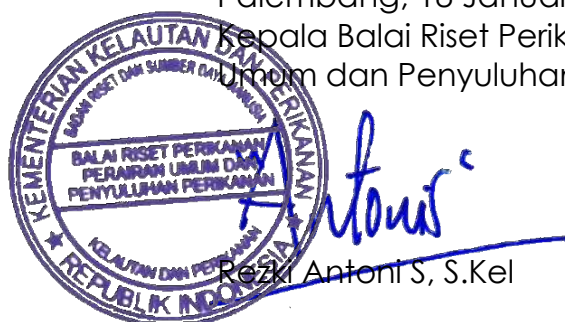
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRPPUPP Tahun 2023. LKjIP BRPPUPP disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BRPPUPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BRPPUPP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil- hasil penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, 18 Januari 2024

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan SDM BRPPUPP	4
1.5. Sistematika Laporan Kerja	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Rencana Kerja Tahunan	19
2.3. Perjanjian Kinerja	20
2.4. Pengukuran Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2023.....	25
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
3.3. Akuntabilitas Keuangan	78
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Tahun 2023.....	79
BAB IV PENUTUP	82
4.1. Capaian Kinerja Utama.....	83
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Output dan Pagu Anggaran BRPPUPP TA 2023.....	20
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP Tahun 2023	21
Tabel 3. Indeks Capaian IKU.....	23
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 5. Capaian IKU 1	28
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU 1 Dengan Satminkal lain	29
Tabel 7. Capaian IKU 2.....	30
Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU 2 Dengan Satminkal lain	31
Tabel 9. Capaian IKU 3.....	32
Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU 3 Dengan Satminkal lain	33
Tabel 11. Capaian IKU 4.....	33
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU 4 Dengan Satminkal lain	34
Tabel 13. Capaian IKU 5.....	35
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU 5 Dengan Satminkal lain	44
Tabel 15. Capaian IKU 6.....	45
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU 6 Dengan Satminkal lain	47
Tabel 17. Capaian IKU 7.....	48
Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU 7 Dengan Satminkal lain	48
Tabel 19. Capaian IKU 8.....	49
Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU 8 Dengan Satminkal lain	50
Tabel 21. Capaian IKU 9.....	51
Tabel 22. Rincian PNBp Tahun 2023	51
Tabel 23. Rincian PNBp berdasarkan aplikasi OMSPAN	52
Tabel 24. Capaian IKU 10.....	53
Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU 1 Dengan Satminkal lain	54
Tabel 26. Capaian IKU 11	57
Tabel 27. Capaian IKU 12.....	59
Tabel 28. Hasil PM SAKIP BRPPUPP TA 2023	60

Tabel 29. Capaian IKU 13.....	64
Tabel 30. Capaian IKU 14.....	66
Tabel 31. Capaian IKU 14 lingkup Pusrisikan	67
Tabel 32. Capaian IKU 15.....	68
Tabel 33. Capaian IKU 16.....	69
Tabel 34. Capaian IKU 17.....	70
Tabel 35. Capaian IKU 18.....	71
Tabel 36. Capaian IKU 19.....	74
Tabel 37. Perbandingan Capaian IKU 19 Dengan Satminkal lain	75
Tabel 38. Capaian IKU 20.....	76
Tabel 39. Perbandingan Capaian IKU 20 Dengan Satminkal lain	76
Tabel 40. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	77
Tabel 41. Efisiensi Anggaran BRPPUPP Tahun 2023	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP	4
Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2023	5
Gambar 2.1 Sasaran Kegiatan BRPPUPP Tahun 2023.....	11
Gambar 3. Dashboard Kinerja Tahun 2023	26
Gambar 4. Produk Inovasi Poklahsar Desa Ajakkang	47
Gambar 5. Produk Poklahsar Desa Kendalbulur.....	47
Nilai Efisiensi BRPPUPP pada aplikasi SMART DJA	80
Gambar 5. Dashboard Kinerja Tahun 2023	83

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BRSDM KP 2020-2024, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-1 yaitu merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten.

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2023 sebesar 103,92%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Pada Tahun 2023 dari 20 IKU BRPPUPP telah mencapai target sehingga berstatus hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPPUPP tercapai sebanyak 5633 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 5600 kelompok dengan persentase sebesar 100,59%

2. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 271 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 260 kelompok dengan persentase sebesar 104,23%
3. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 554 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 497 kelompok dengan persentase sebesar 111,47%
4. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang) tercapai sebanyak 1079 orang dari target Tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 1068 orang dengan persentase sebesar 101,03%
5. Desa/Kawasan mitra yang menerapkan lptek KP lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa) tercapai sesuai dengan target Tahun 2023 yaitu 2 Desa dengan persentase sebesar 100%
6. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 2 Kelompok sesuai dengan target Tahun 2023 dengan persentase sebesar 100%
7. Sarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit) tercapai sebanyak 1 Unit sesuai dengan target tahun 2023 dengan persentase sebesar 100%
8. Prasarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit) tercapai sebanyak 1 Unit sesuai dengan target tahun 2023 dengan persentase sebesar 100%
9. Nilai PNBK BRPPU-PP (Rupiah Miliar) dengan capaian di Tahun 2023 sebesar 0,197 Rupiah Miliar dengan target yang ditetapkan sebanyak 0,047 Rupiah Miliar dengan persentase sebesar 120%
10. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPU-PP (%) memiliki capaian 0% dari target Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 0,5 % dengan persentase 120%
11. Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP tercapai sebesar 87,65 dengan target tahun 2023 sebesar 78 dan persentase sebesar 112,37%
12. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP tercapai dengan nilai 81,15 dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 76 dengan persentase sebesar 106,78%

13. Nilai Rekonsiliasi tercapai dengan nilai 94,81 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 93 dengan persentase sebesar 101,95%
14. Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai sebesar 116,67% dengan target Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 92% dengan persentase sebesar 120%
15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%) dengan capaian sebesar 80% sesuai dengan target yang ditentukan dan persentase sebesar 100%
16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai) tercapai sebesar 95,60 dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 93,75 dengan persentase sebesar 101,97%
17. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP tercapai sebesar 86,46 dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 82 dengan persentase sebesar 105,44%
18. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPUPP (kemitraan) tercapai sebanyak 4 kemitraan dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 3 kemitraan dengan persentase sebesar 120%
19. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
20. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPPUPP. BRPPUPP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRPPUPP Tahun 2023 sebesar Rp. **78.943.879.795** atau 98,44% dari pagu anggaran Rp. **80,190,946,000,-**

Capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP TA. 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TAHUN	
				TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5600	5633
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	260	271
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	497	554
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1068	1079
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Desa/Kawasan mitra yang menerapkan lptek KP Lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	2	2
		6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	2	2
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1	1
		8	Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1	1
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	9	Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar)	0,047	0,197
		10	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)	≤ 0,5	0
		11	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	78	87,65
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76	81,15
		13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)	93	94,81
		14	Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	116,67
		15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)	80	80
		16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP BRPPUPP (nilai)	93,75	95,60
		17	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)	82	86,46
		18	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindak;anjuti BRPPU-PP (kemitraan)	3	4
		19	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)	100	100
		20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100	100

BAB I PENDAHULUAN

- 01 — Latar Belakang**
- 02 — Tujuan**
- 03 — Tugas dan Fungsi**
- 04 — Keragaman SDM BRPPUPP**
- 05 — Sistematika Laporan Kinerja**

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Riset Perikanan (Pusrisikan) tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) tahun 2020-2024, di mana keduanya mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dan didalamnya juga mengatur tentang pembentukan Pusat Riset Perikanan dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP

adalah melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung dengan jumlah penyuluh sebanyak 467 orang. Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPPUPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Tahun 2023.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPPUPP untuk meningkatkan Kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Penyuluhan Perikanan yang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

2. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
6. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

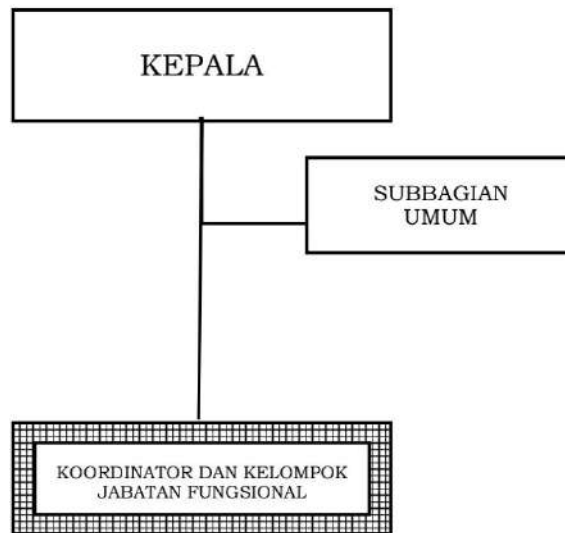
Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian umum dan kelompok fungsional, namun saat ini pasca penyetaraan jabatan struktural ke fungsional masih terdapat Subkoordinator dan Pelaksana yang sebelumnya merupakan pejabat struktural eselon IV dan V yaitu:

Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Tata Operasional, dan Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana, serta Subkoordinator Penyuluhan. Subkoordinator Tata Usaha terdiri atas Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum dan Pelaksana Urusan Kepegawaian, Subkoordinator Tata Operasional terdiri dari Pelaksana urusan Program dan Anggaran dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas Pelaksana Urusan Pelayanan Teknis dan Pelaksana Urusan Prasarana dan Sarana, dan Subkoordinator Penyuluhan terdiri atas Pelaksana urusan Kelembagaan Kelompok dan Pelaksana urusan Penyelenggaraan.

Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

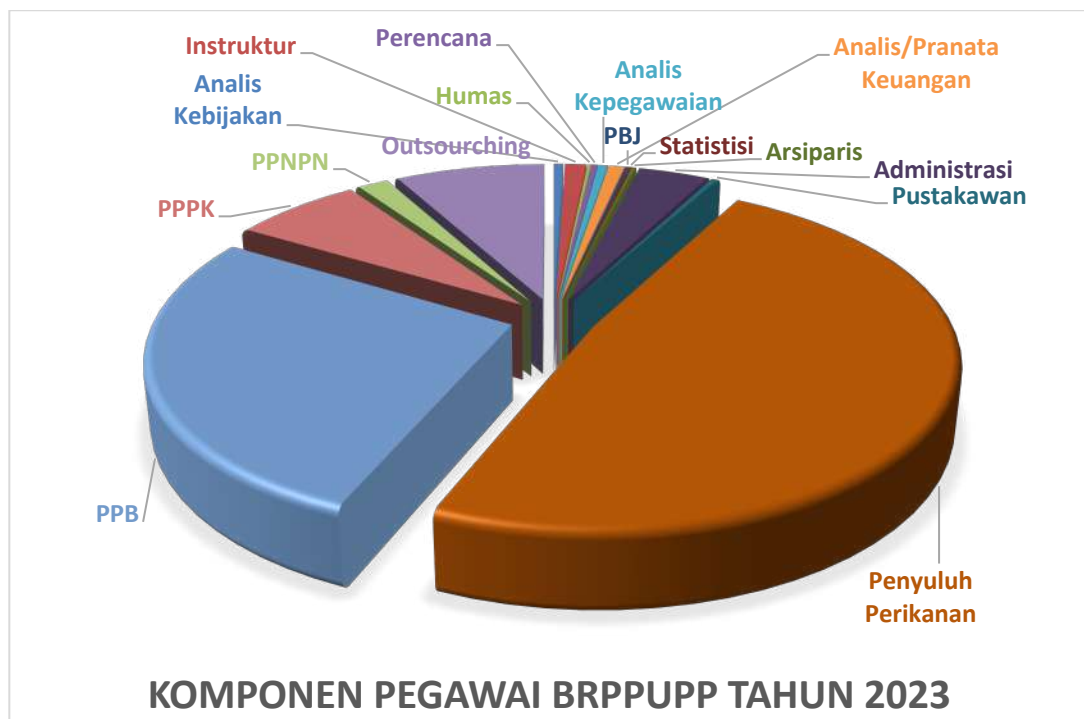


Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP

1.4. Keragaan SDM BRPPUPP

BRPPUPP Palembang dikepalai oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), 1 Kasubbag Umum dan didukung oleh 592 Pegawai terdiri atas terdiri atas 3 orang Analis Kebijakan, 7 orang Instruktur, 1 orang Humas, 1 orang Perencana, 3 orang Analis Kepegawaian, 5 orang Analis/Pranata Keuangan, 1 orang PBJ, 1 orang Statistisi, 1 orang Arsiparis, 23 orang tenaga Administrasi, 2 orang Pustakawan, 278 orang Penyuluh Perikanan, 150 orang Penyuluh Perikanan Bantu, P3K Penyuluh 52 Orang, 10 orang tenaga PPNP, 52 orang tenaga Outsourcing. Tenaga PPNP dan outsourcing berperan dalam membantu kegiatan administrasi, security, Driver, cleaning service, Gardener.

Jumlah pegawai BRPPUPP tersaji dalam grafik dibawah ini:



Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2023

1.5. Sistematika Laporan Kerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPPUPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BRSDM
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPPUPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPPUPP Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab IV Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 01 — Rencana Strategis**
- 02 — Rencana Kinerja Tahunan**
- 03 — Perjanjian Kinerja**
- 04 — Pengukuran Kinerja**

2.1. Rencana Strategis

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, salah satunya adalah perairan umum daratan. Perairan umum di Indonesia tercatat seluas 54 juta ha, terdiri dari 12 juta ha sungai dan rawa, 2,1 juta ha danau (alami dan buatan), dan 39,9 juta ha perairan rawa pasang surut. Perairan umum mempunyai posisi strategis dan berfungsi serba guna, selain dimanfaatkan oleh sektor perikanan juga dimanfaatkan oleh sektor Pekerjaan Umum, perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi, perhubungan dan pemukiman (Ilyas *et al*, 1990).

Perairan umum daratan terdiri dari sungai, rawa (rawa banjir, rawa gambut dan rawa pasang surut), estuaria, danau dan waduk serta genangan air lainnya. Sungai merupakan perairan yang mengalir (*lotic water*), memiliki karakteristik mengalir searah dari hulu ke hilir, aliran bagian hulu lebih deras dari pada yang hilir (Ewusie, 1990; Odum, 1993). Sungai-sungai besar banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Keanekaragaman ikan di sungai cukup tinggi sebagai contoh di DAS Kapuas telah ditemukan lebih dari 300 jenis ikan, di DAS Barito lebih dari 110 jenis, sedangkan di DAS Musi lebih dari 200 jenis (Dudley, 1996; Husnah *et al.*, 2008). Tiap tipe ekosistem sungai bagian hulu, tengah dan hilir mempunyai jenis ikan yang khas. Jenis ikan khas di hulu sungai (*up-stream*) sebagai contoh ikan Semah (*Tordourenensis*), bagian tengah (*middle-stream*) yaitu ikan Belida (*Chitala lopis*), dan bagian hilir (*lower-stream*) yaitu Sembilang (*Paraplotosus albilabris*) (Utomo, *et al* 2007). Keanekaragaman jenis ikan penghuni sungai cukup tinggi, namun belum ada data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini karena penelitian masih bersifat spasial.

Setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005-2009, pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada RPJMN II 2010-2014 semakin menjadi arus utama. Demikian pula dengan sub sektor perikanan tangkap di dalamnya, baik itu perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum daratan (PUD). Pelaksanaan pengarusutamaan tersebut mengacu kepada tema RPJMN II sebagaimana telah tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yakni “memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian”. Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN dimaksud menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan

Perikanan serta Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan diadopsi menjadi Renstra Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Dan BRPPUPP Palembang memiliki penyuluh perikanan sebanyak 483 orang yang tersebar di 5 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

1. Visi

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional dengan kuatnya ketahanan pangan, tingkat kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat diperlukan pembangunan fundamental berdasarkan kajian yang terukur dan dapat diimplementasikan *stakeholder* perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pelaksana dalam pengkajian sumberdaya dan pemanfaatan perikanan khususnya wilayah daratan bertanggung jawab secara langsung guna memberikan kajian, analisa, data, dan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam pembangunan perikanan daratan. Visi BRPPUPP Berdasarkan Visi pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga mengacu visi Presiden 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Dari visi Presiden kemudian ditetapkan visi KKP 2020-2024 untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden. Visi KKP 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Selanjutnya BRSDM KP untuk mendukung visi KKP menetapkan visi BRSDM KP 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi Pusat Riset Perikanan adalah **“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong melalui riset dan inovasi iptek perikanan”**.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Adapun keinginan tersebut dituangkan dalam visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut:

“Mewujudkan Sains Dan Teknologi Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kelestarian dan Pemanfaatan yang Berkesinambungan”

2. Misi

Dalam pencapaian Visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- b. Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan;
- c. Melakukan penelitian bio-ekologi ikan di perairan umum daratan;
- d. Meningkatkan pemanfaatan praktis hasil penelitian melalui diseminasi, simposium dan workshop kepada stakeholder;
- e. Menyebarkan informasi dan teknologi hasil penelitian dalam berbagai bentuk publikasi ilmiah dan semi ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694). BRPPUPP memiliki tugas Melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, dengan fungsi /uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. Pelaksanaan riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;

- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan perairan umum daratan;
- d. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f. Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

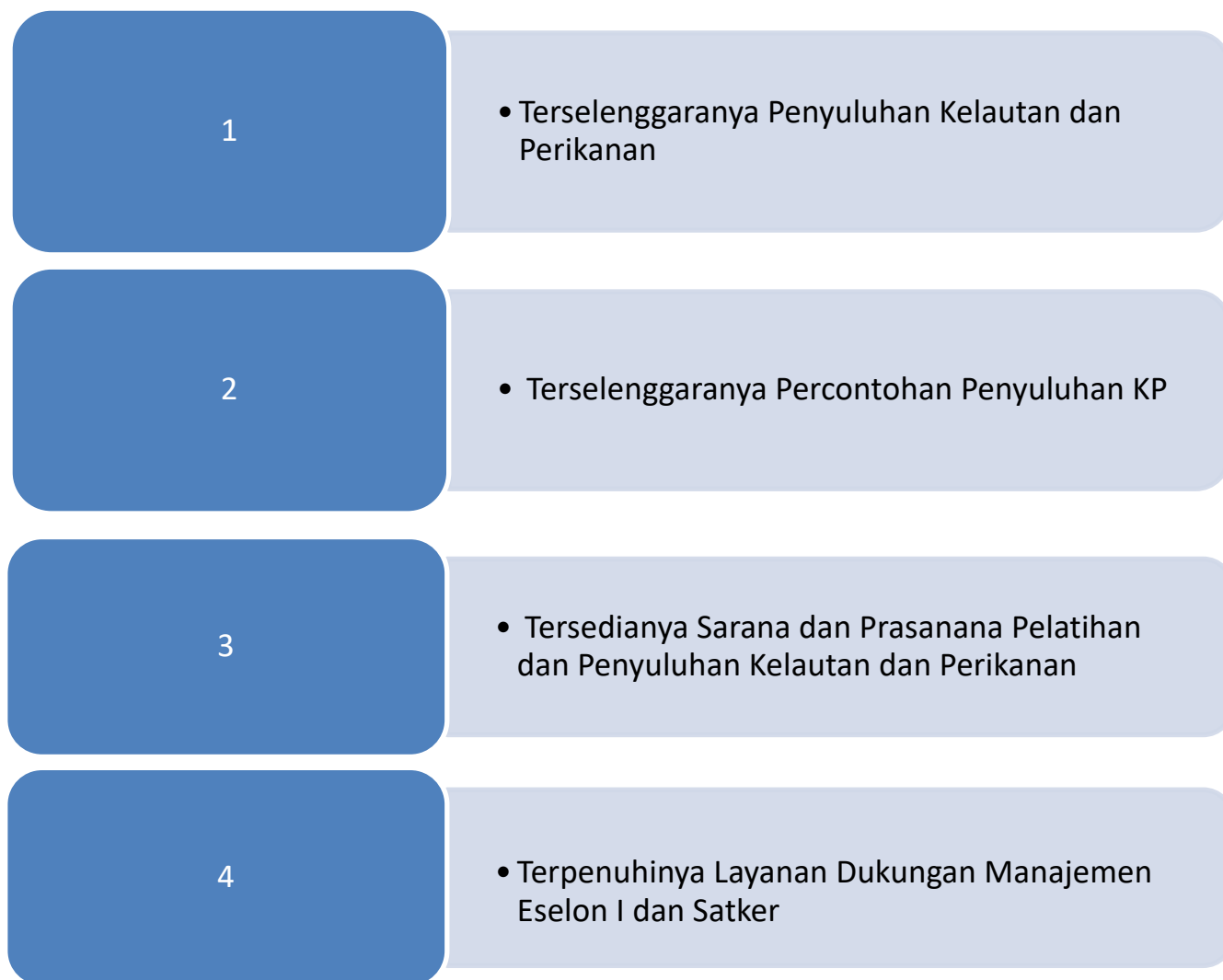
3. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi BRPPUPP yang telah dijelaskan tersebut diatas bertujuan untuk:

- a. Melestarikan Sumber plasma nutfah perikanan di perairan umum daratan
- b. Melestarikan dan memelihara kesehatan lingkungan ekosistem perairan umum daratan
- c. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan di perairan umum daratan
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM untuk melakukan riset.
- f. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana riset
- f. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BRPPUPP tahun 2023 berdasarkan tujuan yang akan dicapai dibagi dalam tiga Sasaran Kegiatan yaitu:



Gambar 2.1. Sasaran Kegiatan BRPPUPP tahun 2023

A. Sasaran Kegiatan 1

Dalam sasaran kegiatan 1 ini memiliki 4 indikator kinerja yang Menjabarkan misi "Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan", maka sasaran kegiatan pertama (1) yang akan dicapai adalah "Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh, Ditingkatkan dan Dibentuk serta tenaga kerja yang terlibat", dengan indikator kinerja:

- Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok). Dilakukan dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan, serta melibatkan intansi terkait dan masyarakat setempat.
- Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok).

- Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok).
- Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang).

B. Sasaran Kegiatan 2

Dalam sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator kinerja. Untuk Sasaran kegiatan ke dua (2) adalah " Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP". Didalam SS-2 ini terdiri dari:

- Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas)
- Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok).

C. Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan ke tiga (3) adalah "Tersedianya Sarana dan Prasanana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan" dimana di dalamnya terdapat dua IKU yaitu:

- Sarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)
- Prasarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)

D. Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan ke empat (4) adalah "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker" dimana di dalamnya terdapat sepuluh IKU yaitu:

- Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar)
- Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPU-PP (%)
- Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)
- Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)
- Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai)

- Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)
- Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)
- Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)
- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor.

Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun, yaitu 5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap didominasi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%) sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%).

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 triliun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut.

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/perairan umum dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen penting dalam keberlanjutan perikanan perairan umum itu sendiri.

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat. Terhitung mulai 01 Januari 2018 penyuluh perikanan secara administrasi dibagi menjadi 9 Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang tersebar di Indonesia.

b. Permasalahan

• Degradasi Lingkungan

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya tingkat kesejahteraan berdampak pada perubahan tata guna lahan/perairan yang mempengaruhi mutu lingkungan habitat ikan, menyempitnya kawasan perikanan tangkap, rusaknya tempat pemijahan (*spawning ground*), pencemaran bahan beracun, bahkan terganggunya ruaya ikan. Perubahan iklim global baik pemanasan, pendinginan ataupun perubahan siklus musim hujan-kemarau juga akan mempengaruhi siklus hidup ikan.

• Penangkapan yang tidak bijaksana

Meningkatnya jumlah penduduk dan pengguna wilayah perairan umum menjadikan tingkat pemanfaatan meningkat. Salah satunya adalah kegiatan penangkapan yang diperuntukan baik untuk peruntukan konsumsi rumah tangga atau komersial perdagangan. Tingkah laku penangkapan yang semakin intensif mendorong masyarakat berlomba mendapatkan produksi maksimal yang sudah tidak berimbang dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini menjadikan timbul kegiatan penangkapan yang membahayakan, baik untuk nelayan itu sendiri dan sumber daya ikan ke depan. Kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak bijaksana yaitu tangkap lebih maupun penggunaan alat tangkap berbahaya, menggunakan bahan peledak dan beracun akan berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Kegiatan penangkapan merusak juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan baik secara permanen atau sementara, baik menimbulkan dampak yang dapat direduksi atau tidak tereduksi.

• Persaingan pemanfaatan perairan umum

Perairan umum merupakan perairan multi guna yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor pembangunan (multisektor) sehingga dapat terjadi persaingan dalam pemanfaatan yang didasarkan atas kepentingan masing-masing sektor. Dampak yang mungkin terjadi meliputi reklamasi/pengeringan rawa untuk pertanian, reklamasi untuk pemukiman, pembuatan bendungan, dan pembuangan limbah baik dari kegiatan rumah tangga, pertanian, pariwisata maupun industri yang semuanya dapat mengganggu kehidupan ikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan yang dampaknya dapat diklasifikasikan menjadi a). Tingkat tekanan tinggi, b) Tingkat tekanan sedang, c). Tingkat tekanan rendah, dan d). Dampak yang belum kelihatan nyata.

- **Tingkat tekanan tinggi**

Indikator perairan mendapat tekanan tinggi yaitu ada pencemaran bahan organik dan anorganik di atas ambang batas mutu air; ditandai terjadi kematian ikan yang berulang kali, alih fungsi lahan kelihatan jelas; di sekitar perairan banyak terdapat industri dan perumahan penduduk, mengalami pendangkalan, sulit mendapatkan ikan asli, profesi nelayan banyak beralih ke profesi lain, hasil tangkapan hanya untuk keperluan rumah tangga atau pasar lokal. Contoh perairan umum mendapat tekanan tinggi adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, Sungai Citarum, Waduk Cirata, dan Danau Rawa Pening.

- **Tingkat tekanan sedang**

Perairan yang mendapat tekanan sedang ditandai pencemaran bahan organik dan anorganik secara temporal dan parsial pada bagian perairan tertentu, terjadi dampak kematian ikan namun tidak lama kemudian baik kembali, alih fungsi lahan sudah kelihatan pengaruhnya, pengelolaan oleh kearifan lokal masih ada, masih banyak jenis ikan asli namun populasinya cenderung menurun, ada jenis ikan sudah langka bahkan punah, dan masih dijumpai nelayan tetap yang kehidupannya tiap hari mencari ikan dimana hasil tangkapan di samping untuk keperluan sendiri juga dipasarkan ke luar daerah baik dalam bentuk segar maupun olahan. Contoh PUD yang SD ikan sudah mendapat tekanan sedang antara lain Sungai Musi, Sungai Batanghari Jambi, Sungai Barito, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Kedung Ombo, Danau Laut Air Tawar, Danau Toba, dan Danau Maninjau.

- **Tingkat tekanan rendah**

Perairan mendapat tekanan rendah ditandai pencemaran bahan organik dan organik yang baru sedikit, alih fungsi lahan mulai kelihatan pengaruhnya, jauh dari perkotaan, masih banyak jenis ikan asli namun sudah terjadi penurunan populasi pada jenis tertentu, masyarakat yang tinggal di perairan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tetap, hasil tangkapan bukan hanya untuk keperluan sendiri namun juga dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk segar maupun olahan,

dan pengelolaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Contoh perairan yang mendapat tekanan rendah yaitu kawasan Danau Sentarum Kalimantan Barat, Waduk Koto Panjang, dan Waduk Riam Kanan.

- **Dampak tekanan belum kelihatan nyata**

Sangat sedikit perairan yang tekanannya belum kelihatan nyata, umumnya terletak di daerah pedalaman, jauh dari sumber pencemaran, kekayaan jenis ikan asli masih tinggi, bahkan masih ditemukan ikan yang tergolong langka, dikelola ketat berdasarkan peraturan adat setempat secara turun menurun, dan seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar perairan merupakan nelayan tetap, contohnya di Danau Belaram dan Danau Empangau, Kalimantan Barat.

- **Ketersediaan dan kompilasi data yang valid pengelolaan perikanan masih terbatas.**

- Pencatatan data masih terpasial dan terpisah belum terintegrasi dan belum ada platform untuk pencatatan data PUD
- Stakeholder PUD terdiri dari usaha perikanan kecil yang sangat banyak jumlahnya dan hasilnya banyak yang dikonsumsi secara mandiri.
- Perikanan PUD lebih banyak bersifat parttime job dibanding pekerjaan utama.
- Hasil dari perikanan PUD kecil dan biasanya Undervalue.
- Perikanan PUD didominasi oleh masyarakat kurang mampu dan berpendidikan kurang.

- **Penyuluhan Perikanan**

Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- i. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;
- ii. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- iii. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;

- iv. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- v. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- i. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- ii. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- iii. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai;
- iv. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- v. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- vi. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- vii. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- viii. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPPUPP Tahun 2023 menetapkan 3 program yaitu Pendidikan dan pelatihan vokasi, Riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp. 80,190,946,000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Output dan pagu anggaran 2023

KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN
2375	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		9,942,617,000
2375.DDA.001	Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan	1 produk	500,000,000
2375.QJA.001	Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji Kelayakannya	3 Produk	1,500,000,000
2375.QDD.001	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dari penyuluh KP	5.600 Kelompok	7,908,460,000
2375.RAL.001	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP	1 Unit	11,100,000
2375.RBQ.001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	23,057,000
2378.EBA	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		70,248,329,000
2378.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	21,650,000
2378.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	46,743,000
2378.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	336,286,000
2378.EAA.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	69,554,565,000
2378.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	53 Orang	73,340,000
2378.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	82,035,000
2378.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	103,710,000
2378.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	30,000,000
	TOTAL		80,190,946,000

2.3. Perjanjian Kinerja

Rincian dan target Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 di sajikan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar)	0,047
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)	≤ 0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	78
		4	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)	93
		6	Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)	80
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP BRPPUPP (nilai)	93,75
		9	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindak;anjuti BRPPU-PP (kemitraan)	3
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5600
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	260
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	497
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1068
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	2
		6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	2
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1
		8	Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker Lingkup BRPPUPP	8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100

2.4. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRSDM Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indeks capaian IKU

Baik	Seda	Buruk
Indeks Capaian > 100 %	Indeks Capaian = 100%	Indeks Capaian < 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card* (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPPUPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BRPPUPP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Kepala BRPPUPP NOMOR: K.27/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah BRPPUPP. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat struktural eselon IV dan V serta staf yang mewakili.

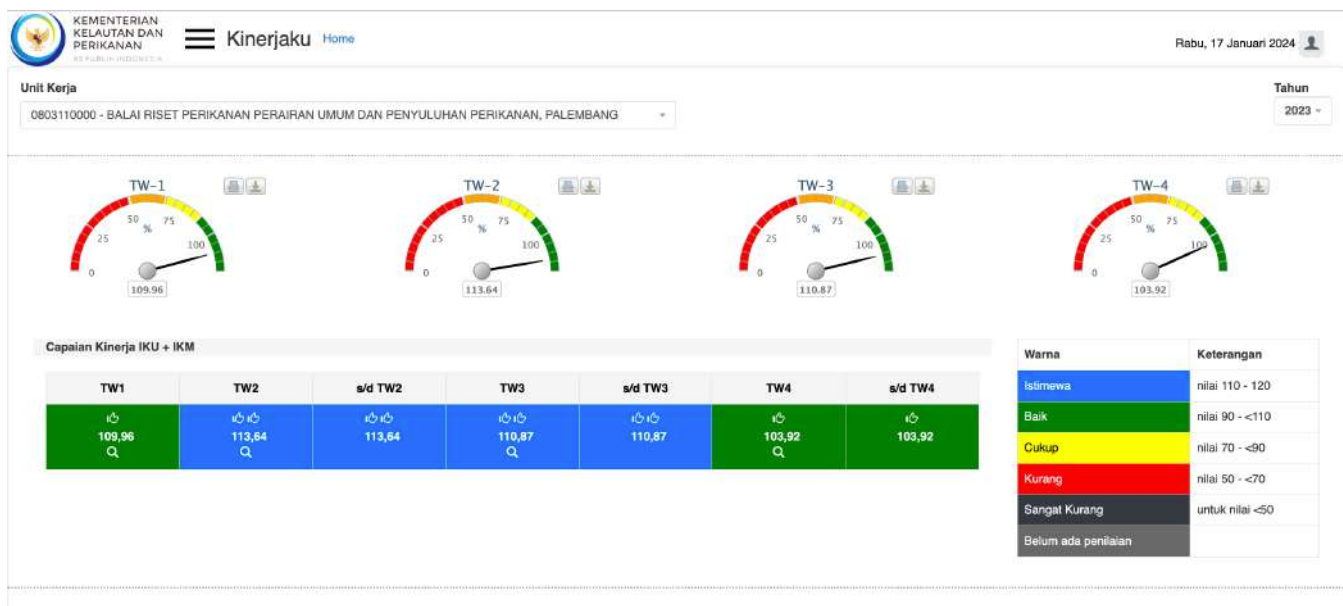
Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala BRPPUPP. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, seksi Tata Operasional BRPPUPP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 01 — Prestasi Indikator Kinerja TA 2023**
- 02 — Evaluasi dan Analisis Kinerja**

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2023 sebesar 109,96% per 14 Januari 2023, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Dashbord Kinerja Tahun 2023 BRPPUPP

Selama tahun 2023, dari target 20 IKU BRPPUPP terdapat 20 IKU yang telah mencapai target di Tahun 2023, sehingga berstatus hijau dan biru.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPPUPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPPUPP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Tabel. 4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TAHUN 2023		%
			TARGET	CAPAIAN	
1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5600	5600	5633	100,59
2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	260	260	271	104,23
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	497	497	554	111,47
4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1068	1068	1079	101,03
5	Desa/Kawasan mitra yang menerapkan lptek KP Lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa)	2	2	2	100
6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	2	2	2	100
7	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1	1	1	100
8	Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1	1	1	100
9	Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar)	0,047	0,047	0,197	120

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TAHUN 2023		%
			TARGET	CAPAIAN	
10	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)	≤ 0,5	≤ 0,5	0	120
11	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	78	78	87,65	112,37
12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76	76	81,15	106,78
13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)	93	93	94,81	101,95
14	Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92	116,67	120
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)	80	80	80	100
16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP BRPPUPP (nilai)	93,75	93,75	95,60	101,97
17	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)	82	82	86,46	105,44
18	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	3	3	4	120
19	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)	100	100	100	100
20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN 1 :

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1

Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok,

pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Tabel 5. Capaian IKU Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

SS 1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IKU 1 Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)								
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
	2022							
5178	5600	5633	100,59	8,14	5600	100,59	-	-

Pada Tahun 2023 capaian indikator kinerja ini telah mencapai persentase sebesar 100,59% dari target yang ditetapkan. Realisasi yang didapat adalah sebesar 5633 kelompok dengan target di Tahun 2023 sebanyak 5600 kelompok. Pada tahun 2022, indikator ini telah tercapai sebesar 5178. Dilihat dari jumlah realisasi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pada Tahun 2023 lebih tinggi dengan persentase kenaikan sebesar 8,14% dan realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan.

Perolehan capaian indikator kinerja yang melebihi target ini dapat dikarenakan kinerja penyuluh perikanan SATMINKAL BRPPUPP sangat baik dan mengalami peningkatan kinerja di tahun 2023. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 7.872.407.480 (99,54%) dengan pagu Rp 7.908.460.000

Capaian IKU Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satminkal lain lingkup BPPSDM KP dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	5.600	56.33	100,59
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	7.500	7.519	100,25
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	3.800	3.800	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	5.200	5.487	105,52

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu meencapai persentase 100,59%.

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Indikator Kinerja 2

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kriteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau; Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Adapun pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung jumlah kelompok pelaku utama/usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dari Jumlah Kelompok pelaku utama/pelaku

usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, di periode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 7. Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

SS 1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU 2	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
276	260	271	104,23	-1,81	260	104,23	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator ini pada Tahun 2023 telah mendapat realisasi sebanyak 271 kelompok dari target yang ditetapkan yaitu 260 kelompok, sehingga persentase capaian untuk indikator ini sebesar 104,23%. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi pada periode yang sama di tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 1,81% dimana pada tahun tersebut indikator ini mencapai realisasi 276 kelompok. Walaupun mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, pada tahun ini IKU peningkatan kelas kelompok telah melebihi target dengan persentase capaian 104,23%.

Perolehan nilai capaian indikator berikut dapat dikarenakan penyuluh SATMINKAL BRPPUPP telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kelas kelompok kelautan dan perikanan yang mereka suluh, sehingga capaian pada indikator berikut dapat melebihi target.

Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	260	271	104,23
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	319	314	101,29
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	130	148	113,85
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	280	297	106,07

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 104,23%. Begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%.

Indikator Kinerja 3

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok) Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Perikanan setempat.;

Adapun cara pengukuran IKU ini yaitu Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan di periode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 9. Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

SS 1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU 3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
716	497	554	111,47	-22,62	497	111,47	-	-

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2023 capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 554 kelompok dari target sebanyak 497 kelompok. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022, indikator ini memiliki penurunan sebesar 22,62% dengan jumlah realisasi di tahun tersebut sebanyak 761 kelompok. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan target dalam pemenuhan capaian IKU ini, namun demikian dengan realisasi yang telah dicapai IKU ini tetap melebihi target yang telah ditentukan. Artinya pada tahun ini, terdapat peningkatan kinerja penyuluh dalam memenuhi pencapaian target indikator pembentukan kelompok.

Terlampauinya capaian dari target yang telah ditetapkan juga dapat dikarenakan banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru serta kinerja penyuluh SATMINKAL BRPPUPP sangat baik sehingga dapat membentuk banyak kelompok baru di wilayah binaan penyuluh masing-masing.

Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	497	554	111,47
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	355	361	101,69
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	290	348	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	315	368	116,83

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 111,47%. Begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%.

Indikator Kinerja 4

Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BRSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Swadaya, UMKM yang disuluh, dan P2MKP

Tabel 11. Capaian IKU Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)

SS 1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU 4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
1473	1068	1079	101,03	-26,74	1068	101,03	-	-

Pada Tahun 2023, target untuk Indikator Kinerja Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP yaitu sebanyak 1068. Adapun target yang telah dicapai pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1079 orang. Capaian kinerja ini berasal dari rekap tenaga kerja yang terdiri dari Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Perikanan Swadaya, dan UMKM binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPPUPP.

Capaian Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1.068	1.079	101,03
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1.282	1.282	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	889	921	103,6
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1.956	2.026	103,58

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 101,03%. Begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%

SASARAN KEGIATAN 2 :

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 5

Desa/Kawasan mitra yang menerapkan lptek KP lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas)

Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BRSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village (SFV)

Sesuai dengan Keputusan Ka BRSDM No.38/2022, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

Indikator capaian Input :

- Penilaian calon lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV oleh TAP dan Unit Kerja Pusat
- Jumlah desa dikembangkan sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV yang dikeluarkan melalui SK Ka BRSDM

Indikator capaian Output :

- Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan Tridarma Perguruan Tinggi pada lokasi Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries

village SMART SFV oleh unit kerja pusat

Indikator Outcome :

- Penilaian hasil pelaksanaan Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV yang dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan berdasarkan instrument penilaian
- Penghitungan capaian minimal sd indikator capaian output

Tabel 13. Capaian IKU Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas)

SS 2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP							
IKU 5	Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	2	2	100	-	2	100	-	-

Pada Tahun 2023, BRPPUPP memiliki iku baru yaitu Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BRPPUPP yaitu Desa Perikanan Cerdas. Di tahun ini target yang telah disepakati yaitu 2 desa dan target yang telah dicapai sesuai dengan target yaitu SFV Desa Linau, Kab. Kaur, Bengkulu dan SFV Desa Sungai Dua, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

A) SFV Desa Linau, Kab. Kaur, Bengkulu

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KP Nomor 156 tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village BRSDM KP, BRPPUPP diberi amanah dalam melaksanakan kegiatan program SFV Desa Linau dengan jenis kegiatan/komoditi gurita. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Komoditi utama Desa Linau berupa gurita. Gurita telah menjadi ikon bagi Kabupaten Kaur (Valentino dan Nur'aini, 2017). Potensi gurita di Desa Linau sudah terkelola dari hulu hingga hilir, namun pemanfaatannya masih bersifat konvensional.

Pelaksanaan kegiatan SFV Desa Linau sangat melibatkan Penyuluh Perikanan. Penyuluh perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan. Peran penyuluh yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengembangan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, namun juga dalam memotivasi, membimbing, dan mendorong para pelaku usaha dalam mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusaha untuk hidup sejahtera

Adapun progress kegiatan serta capaian outcome dari kegiatan SFV Desa Linau adalah sebagai berikut :

Progres Kegiatan :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pelatihan/workshop/bimtek/sosialisasi/literasi	Telah dilaksanakan 19 paket pelatihan/workshop/ bimtek/ sosialisasi/ literasi 1. Pelatihan penangkapan & budidaya (9 paket) 2. Pelatihan pengolahan (3 paket) 3. Pelatihan eko eduwisata (5 paket) 4. Pelatihan digitalisasi (2 paket)
2	Penyuluhan dan pendampingan	1. Jumlah kelompok yang disuluh - Poklahsar 5 - Pokdakan 1 - KUB 4 - Koperasi 4

		- Gapokan 1 (penambahan) 2. Penguatan legalitas kelompok yang disuluh: pemasangan papan nama kelompok KP 3. Kenaikan kelas Poklahsar IKM Putra Daerah 24 Oktober 2023 (semula pemula menjadi madya). 4. Penumbuhan kelompok: Gapokkan 1 (Mei 2023). 5. Pendampingan program Pokmaswas (reaktif pada Agustus 2023). 6. Pendataan data pelaku utama. 7. Fasilitator akses pemasaran: pengurusan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) a.n. Ibu Maryani (Poklahsar Ke'ite Maju) komoditi gurita ekspor. 8. Fasilitator pembuatan rancangan Perdes Konservasi Gurita dan kegiatan <i>Temporary Closure</i> zona tangkapan gurita.
3	Tri Dharma Perguruan Tinggi - Pengabdian Masyarakat (jumlah kegiatan diseminasi teknologi)	Terdapat 2 judul kegiatan diseminasi teknologi oleh Dosen AUP Lampung (Pengalengan Produk Perikanan dan Penangkapan Gurita-21 September 2023).
4	Kelembagaan	Pendampingan dalam pembentukan kelembagaan: • BUMDes Line New Mandiri (September 2023). • Pokdarwis Cahaya Lentera (Agustus 2023).
5	Digitalisasi	• Pelatihan dan pendampingan <i>digital marketing</i> (Oktober-November 2023). • Pendampingan promosi potensi daerah melalui media sosial SFV Desa Linau. • Pendampingan dan pembuatan website

		SFV Desa Linau. • Pengurusan dukungan sarana wifi di Balai Desa.
6	Wisata	1. Pelatihan promosi dan pengelolaan desa wisata/eduekowisata. 2. Pendampingan pembentukan kelembagaan wisata (Pokdarwis Cahaya Lentera) 3. Pengurusan jalin mitra kerjasama terkait eduekowisata antara Desa Linau dengan LATUN. 4. Penambahan spot foto SFV Desa Linau. 5. Pengurusan calon lahan pengembangan eduekowisata Desa Linau.

Outcome :

No	Outcome	Keterangan
1	Realisasi Capaian	Rp. 499.181.612,- (99,83%)
2	Terbentuk berapa kelompok perikanan/tambahan kelompok	1. Gapokkan Keite Linau Sehijean (Mei 2023). 2. BUMDes Line New Mandiri (September 2023). 3. Pokdarwis Cahaya Lentera (Agustus 2023). 4. Aktifnya kembali Pokmaswas Teluk Maje sejak Agustus 2023. 5. Kenaikan kelas kelompok (1): Poklahsar IKM Putra Daerah (Oktober 2023).
3	Dampak kegiatan	1. Masyarakat Desa Linau telah mendapatkan pelatihan/workshop/bimtek/sosialisasi/literasi sebanyak 19 paket. 2. Sebanyak 360 orang telah mendapatkan pelatihan. 3. Terbentuknya rancangan Perdes Konservasi Gurita dan percobaan <i>Temporary Closure</i> zona tangkapan gurita (Oktober 2023).

4. Poklamsar telah menambah 3 jenis produk olahan yaitu sambal gurita, stik gurita dan bakso tuna (diversifikasi produk olahan).
5. Perubahan tingkat pengetahuan & keterampilan yang mempengaruhi produktifitas penangkapan dan pengolahan produk.
6. Ada penumbuhan kelompok (Gapokan, BUMDes, dan Pokdarwis) sehingga proses bisnis KP bertambah.
7. Kenaikan produktifitas gurita menjadi 100%.
8. Kenaikan produksi produk olahan kerupuk Kuritos 30%.
9. Peningkatan pendapatan nelayan gurita per bulan mencapai 30%.
10. Peningkatan pendapatan pengolah kerupuk gurita mencapai 25%.
11. Terdapat penambahan mitra kerjasama Desa Linau dengan 8 instansi (non KKP), yaitu: Shrimp Club Indonesia, Bank Bengkulu, LATUN, AKAR Foundation, BDPAS Ketaun, Radar Selatan, Yayasan Sriwijaya Muda Berdaya; Perpusnas RI.
12. Dampak peran mitra bagi Desa Linau berupa penambahan dana operasional, pengadaan cold storage, pendampingan pengelolaan edukowisata, bibit tanaman pesisir & buah-buahan, dan akses promosi potensi daerah.
13. Penambahan jumlah tenaga kerja yang terdampak program SFV sebanyak 62 org (Linau 37 org, Bintuhan 25 org).
14. Adanya dampak aktif di sektor lapangan kerja pedagang makanan, jasa ekstradisi, pencatat berita/reporter, pedagang toko bangunan, tukang/buruh bangunan, pedagang alat pancing, nelayan sewa perahu, pedagang ATK, tukang sablon, dan pemilik jasa penginapan.

4	Teknologi yang dipakai	1. Penggunaan teknologi (penangkapan dan pengolahan-alat pengasap ikan) masih tradisional namun sudah menggunakan alat bantu. 2. Sudah memanfaatkan penjualan e-commerce (shoope, google bisnis, dan IG). 3. Sudah ada aktifitas promosi via medsos dan website SFV. 4. Sudah ada jaringan internet di tingkat Balai Desa.
5	Pangsa Pasar	1. Indonesia: Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, dan Jawa Tengah. 2. Malaysia.

Dokumentasi Kegiatan :



B) SFV Desa Sungai Dua, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Pelaksanaan program SFV di Desa Sungai Dua Kabupaten Tanah Bumbu diawali dengan identifikasi potensi desa oleh Tim Sosek BPPSDM melalui penilaian rona awal dan rona akhir desa, inventarisasi teknologi yang dimiliki, penyusunan proposal, pelatihan dan penyuluhan alih teknologi, pendampingan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Infrastruktur desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Beberapa jalan di Sungai Dua masih berupa jalan baru dan belum diaspal. Infrastruktur yang baru dibangun antara lain: Unit Pengolahan Ikan/UPI, bale pelatihan dan rumah pakan mandiri. Desa Sungai Dua telah ditetapkan sebagai kampung Patin melalui Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dengan komoditas utamanya berupa patin dan nila. Sebagian masyarakat Desa Sungai Dua adalah pelaku utama usaha perikanan, antara lain sebagai pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Jumlah RTP di Desa Sungai Dua sebanyak 123 RTP. Kegiatan lainnya berupa edu wisata yang baru dimulai pada akhir tahun 2023.

Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan di Desa Sungai Dua dalam rangka mendukung dan mensukseskan program SFV Desa Sungai Dua Kabupaten Tanah Bumbu. Semua pihak berkontribusi dan saling bersinergi melaksanakan, mendampingi/membina semua kegiatan yang dimulai dari kegiatan visitasi, sosialisasi dan pelatihan, ekspose SFV Desa serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Beberapa pelatihan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan di SFV Desa Sungai Dua seperti pelatihan pembuatan pakan ikan, sosialisasi manajemen penanganan ikan, GMP dan proses halal self declare, pelatihan teknologi pengolahan produk ikan patin berbasis zero waste, pelatihan kemasan pada produk perikanan, dan pelatihan pembudidayaan maggot sebagai pakan ikan diharapkan mampu mengembangkan kompetensi SDM masyarakat pengolah dan pembudidaya ikan di Desa Sungai Dua, sehingga program SFV di Desa Sungai dapat berjalan secara optimal, terwujudnya masyarakat yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera. Produk-produk olahan patin yang telah diajarkan diharapkan mampu menambah ragam produk baru patin bagi UMKM pengolah hasil perikanan di Desa Sungai Dua menjadi lebih bervariasi dan luas

jangkauan pemasarannya. Di samping terlaksananya beberapa pelatihan, di Desa Sungai Dua juga telah terbentuk UPR baru dan 1 poklamsar baru dengan nama Sumber Rezeki Cekdam. Berdasarkan penilaian kelas kelompok dari 4 pokdakan di Desa Sungai Dua diperoleh 1 kelompok yang berhasil naik kelas. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang yang merupakan dukungan dari Pemda Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dibangun diharapkan pula mampu mendukung program SFV dapat berjalan lebih optimal.

Kegiatan lain yang tak kalah menarik dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat adalah ekspos SFV Sungai Dua. Kegiatan ekspos SFV meliputi penyerahan kemasan produk olahan dan alat pengolahan kepada dua poklamsar dan penyerahan pakan ikan kepada empat pokdakan secara simbolis, pengukuhan Bunda Forikan kepada ibu Bupati, penyerahan paket untuk pencegahan stunting secara simbolis, kunjungan ke spot-spot instagramable, bale pelatihan, kolam budidaya ikan dan panen ikan, diseminasi dan pameran aneka produk olahan perikanan khususnya ikan patin. Beberapa produk olahan ikan patin yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut antara lain : bakso pelangi ikan patin, rolade ikan patin, burger ikan patin, arancini ikan patin, tahu bakso ikan patin, dan roti sobek menggunakan minyak ikan patin. Pelaksanaan ekspos berjalan lancar dengan melibatkan partisipasi yang aktif dari berbagai pihak dan masyarakat setempat. Melalui serangkaian kegiatan SFV yang telah dilaksanakan tersebut diharapkan Desa Sungai Dua dapat menjadi desa perikanan yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa serta mampu menjadi model bagi teknologi yang dikembangkan oleh KKP untuk dapat diadopsi oleh masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan :





Capaian Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	2	2	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	2	2	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan satker lainnya mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 999.181.612 (99,91%) dengan pagu Rp 1.000.000.000

Indikator Kinerja 6

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok),

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan percontohan dan Pedoman SFV.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan dan Pedoman SFV.

Tabel 15. Capaian IKU Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)

SS 2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP							
IKU 6	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok).							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
2	2	2	100	0	2	100	-	-

Untuk indikator kinerja Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan KP di Samtminkal BRPPUPP target di Tahun 2023 sebanyak 2 kelompok dan untuk capaian kinerja akhir periode tahun 2023 sebanyak 2 kelompok. Pelaksana untuk kegiatan percontohan ini adalah dari Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP). Bentuk dari kegiatan percontohan yang dilaksanakan yaitu menyediakan teknologi yang diterapkan dan disampaikan kepada Kelompok binaan Penyuluh. Adapun jenis inovasi Teknologi yaitu

1. Inovasi Teknologi pada Produk Olahan Perikanan: Mini Brownies, Amplang, Dimsum, Saus Dimsum, Bakso, Curly Udang dan Mie Krezz dengan Kelompok Penerima yaitu Poklahsar Berkah yang berlokasi di Desa Ajakkang, Kab. Barru.

Ukuran keberhasilan kegiatan percontohan yaitu Pelatihan Diversifikasi produk olahan peridkanan diharapkan dapat menjadi peluang usaha bagi poklahsar Secara keseluruhan semua peserta setelah pelatihan, telah memahami manfaat dan cara penampahan bahan tambahan ke dalam komposisi produk. Kelompok pengolah di lokasi Kawasan percontohan di Desa Ajakkang telah terdapat tambahan variasi olahan produk seperti mie krezz, brownies dan dimsum menggunakan resep hasil pelatihan dan telah dipasarkan ke Koperasi PLTU serta masyarakat sekitar dalam dan luar Desa Ajakkang.



Gambar 4. Produk Inovasi yang dipraktekan di Poklahsar Desa Ajakkang

2. Penanganan Bahan Baku Ikan dan Diversifikasi Produk Olahan hasil Perikanan dan Proses Pengajuan Produk Halal dengan Kelompok Penerima yaitu Poklahsar Kendalbulur yang berlokasi di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Praktek pengolahan produk olahan hasil perikanan (ikan patin) yang meliputi Ekstraksi minyak ikan, pengolahan produk rolade, pengolahan produk roti sobek, pengolahan produk mini samosa dan pengolahan produk mie kress dan pengolahan produk sambal. Ukuran keberhasilan kegiatan percontohan ini yaitu Pelaku usaha terdorong membentuk poklahsar baru dan bersama-sama memajukan perekonomian melalui berbagai olahan ikan. Permasalahan dalam pelaksanaan yaitu belum adanya usaha pembenihan lokal Tulungagung sehingga memiliki imbas pada mahalanya biaya transportasi benih, kualitas air yang terlalu tinggi kandungan logam alkali (sadah) sehingga kesulitan untuk memulai usaha pembenihan ikan, tidak adanya jaminan kualitas benih yang dibeli dari luar Kab. Tulungagung. Masih rendahnya serapan hasil budidaya oleh masyarakat sekitar sehingga hasil panen Sebagian besar dikirim ke luar Kab. Tulungagung dan kurangnya usaha pengolah ikan yang dapat menyerap hasil panen dari usaha budidaya.



Gambar 5. Produk dari Poklahsar di Desa Kendalbulur

Realisasi TAHUN 2023 IKU ini sebesar Rp 990.871.276 (99,08%) dengan pagu Rp 1.000.000.000

Capaian Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	2	2	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	8	8	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	4	4	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	3	3	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan satker lainnya mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.

SASARAN KEGIATAN 3 :

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 7

Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

Formula :

Jumlah Sarana yang berbntuk pengadaan fisik dan non fisik / belanja modal

Tabel 17. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 7	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	1	1	100	-	1	100	-	-

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di BRPPUPP sehingga belum dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk capaian indikator kinerja di akhir tahun 2023 yaitu sebanyak 1 unit Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP. Adapun Jenis Sarana yang telah tersedia di tahun 2023 yaitu Smart TV Touchscreen 19 inch Standing Android Sistem dengan volume 1 Paket.

Capaian Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan Capaian IKU Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan satker lainnya mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% dan hanya UPT BRPBAPPP yang tidak mempunyai IKU Sarana.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 11.100.000 (100%) dengan pagu Rp 11.100.000

Indikator Kinerja 8

Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)

Definisi dari IKU ini yaitu Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

Formula :

Jumlah prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal

Tabel 19. Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 8	Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	1	1	100	-	1	100	-	-

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di BRPPUPP sehingga belum dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk capaian indikator kinerja di akhir tahun 2023 yaitu sebanyak 1 unit Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP. Adapun Jenis Prasarana yang telah tersedia di tahun 2023 yaitu Pengadaan Gazebo sebanyak 1 paket yang ditempatkan di Instalasi Penyuluhan BRPPUPP, di Keramasan. Capaian Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP Tahun 2023 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	-	-	-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya BRPPUPP yang mempunyai IKU Prasarana dan telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 23.000.000 (99,75%) dengan pagu Rp 23.057.000

SASARAN KEGIATAN 4 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja 9

Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar)

Definisi dari IKU ini yaitu Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNB

Formula :

Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNB dari Kepala Satker ke Pusat

Tabel 21. Capaian IKU Nilai PNB BRPPU-PP (Rupiah Miliar)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 9	Nilai PNB BRPPU-PP (Rupiah Miliar)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	0,047	0,197	120	-	0,047	120	-	-

Untuk realisasi indikator kinerja PNB capaian di Tahun 2023 sebesar Rp. 197.851.817 dengan target Rp. 47.000.000 dan persentase sebesar 120%. IKU PNB merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan Tahun 2023.

Nilai PNB BRPPUPP yang didapat di Tahun 2023 berasal dari penerimaan Umum dan Fungsional yang didapatkan dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rincian terlampir pada tabel berikut.

Tabel 22. Rincian PNB per Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Jumlah
1	Penerimaan Umum	Rp. 183.708.817
2	Penerimaan Fungsional	Rp. 14.143.000
Jumlah Penerimaan Tahun 2023		Rp. 197.815.817
#Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah#		

Tabel 23. Rincian PNBP dari aplikasi OMSPAN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425991 Penerimaan Kembali Persekol/Uang Muka Gaji	0	0	0	0	1,011,888	0	1,011,888
2	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,688,000	0	0	0	0	3,688,000
3	425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	345,000	0	0	0	0	345,000
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	156,998,500	0	0	3,208,539	0	160,207,039
5	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	48,284	0	48,284
6	425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	550,000	0	0	0	0	550,000
7	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	125,000	0	0	0	0	125,000
8	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	400,000	0	0	0	0	400,000
9	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,066,196	0	0	11,850,410	0	21,916,606
10	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
11	425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	9,560,000	0	0	0	0	9,560,000
GRAND TOTAL		0	181,732,696	0	0	16,119,121	0	197,851,817

Salah satu faktor yang mendukung dalam pencapaian IKU PNBP sehingga dapat melebihi target yaitu :

1. Kontribusi dari sewa tanah hasil kemitraan dengan PT Dizamatra Powerindo sebesar Rp. 150.000.000 dengan detail PNBP Fungsional 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan)
2. Kontribusi dari hasil produksi SMART Fisheries Village (SFV) UPT Patratani dengan total Rp.10.615.000 dari penjualan ikan dan benih serta kunjungan wisata berupa wahana air. Dengan detail PNBP Fungsional 425112 (Pendapatan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan budidaya) sebesar Rp. 9.560.000, dan PNBP Fungsional 425119 (Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya) sebesar Rp. 1.055.000.
3. Kontribusi dari sewa alat laboratorium sebesar Rp. 3.928.000 dengan detail PNBP Fungsional 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi)

Indikator Kinerja 10

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)

Definisi IKU ini yaitu nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHK) BPK atas laporan keuangan (LK) BRPPUPP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 (audited) tidak melebihi $\leq 0,5\%$ dari total realisasi anggaran Unit Eselon 3 Tahun 2022.

Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas tertinggi persentase} = \frac{\text{Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA 2020}}{\text{Realisasi RIIL TA 2020}} \times 100\%$$

Tabel 24. Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)

SS 3 Terpenuhi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker								
IKU 10 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP (%)								
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
0	$\leq 0,5$	0	120	0	$\leq 0,5$	120	-	-

Untuk indikator ini terdapat capaian sebesar 0,00% dengan target $\leq 0,5$ dan persentase sebesar 100% dengan bukti data dukung berupa surat memo dari Sekretariat atau Pusat Riset Perikanan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan di IKU ini dikarenakan capaian memiliki capaian yang sama. Realisasi IKU ini diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2022.

Capaian Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BRSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPUPP Tahun 2022 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	≤0,5	0	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	≤0,5	0	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	≤0,5	0	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	≤0,5	0	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP telah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 120%, begitu pula 3 (tiga) satker lain telah melebihi target.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 175.160.398 (99,35%) dengan pagu Rp 176.300.000

Indikator Kinerja 11

Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)

Definisi IKU ini antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2019).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

IKU Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 komponen dengan bobot sebagaimana tersebut di bawah ini:

- A. Kualifikasi (Bobot 25%)
- B. Kompetensi (Bobot 40%)
- C. Kinerja (Bobot 30%)
- D. Disiplin (Bobot 5%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/Sarjana Muda (SM);
- e. Pendidikan D-2 (Diploma-Dua)/D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma- Satu)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

- a. Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional;
- b. Diklat Teknis;
- c. dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara,

dengan formula sebagai berikut:

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Struktural	Pejabat Fungsional	Staf
	<i>Diklat Struktural</i>	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<i>Diklat Fungsional</i>	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	-	0	-
	<i>Diklat 20 JP</i>	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	0	0
	<i>Seminar</i>	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

No	Keterangan Nilai SKP ***)	Nilai SKP	Nilai PPKP
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai Bobot 5 %
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

1. Kualifikasi dihitung dari kondisi pendidikan terkini dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
2. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, misalkan Pejabat Eselon I Tidak Pernah melaksanakan Diklatpim Tingkat I maka pegawai tersebut nilainya 0;
 - Diklat Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 5 tahun terakhir, apabila dalam kurun waktu tersebut Pernah melaksanakan diklat dan seminar maka nilai kompetensi pegawai tersebut yaitu 15 dan 10 untuk Struktural dan Jabfung serta 22,5 dan 17,5 untuk staf;

3. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP dan di kolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP);
 4. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin dan diupdate pada aplikasi SIMPEG
- Berdasarkan bobot penilaian Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPA BRPPUPP} = \frac{\sum \text{Nilai IPA Pegawai BRPPUPP}}{\sum \text{Pegawai BRPPUPP}}$$

Nilai IPA Pegawai BRPPUPP adalah total nilai IPA pegawai BRPPUPP dibagi total pegawai BRPPUPP dengan perhitungan masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini:

$$\text{Nilai IPA Pegawai Struktural} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklatpim} + \text{diklat 20JP} + \text{seminar}) / 3 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

$$\text{Nilai IPA Pegawai JF} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklat fungsional} + \text{diklat 20JP} + \text{seminar}) / 3 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

$$\text{Nilai IPA Pegawai JFU} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklat 20JP} + \text{seminar}) / 2 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

Bukti capaian akhir antara lain:

1. Data Tingkat Pendidikan (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)
2. Data Kompetensi dasar (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)
3. Data SKP (diambil dari data dasar pada Aplikasi e-SKP KKP)
4. Data Hukuman Disiplin (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)

Tabel 26. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)

SS 3 Terpenuhi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker								
IKU 11 Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)								
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
	79,46	78	87,65	112,37	10,30	78	112,37	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRPPUPP telah tercapai dengan realisasi 87,65 dari target yang ditetapkan sebesar 78. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2023 capaian indikator ini mengalami peningkatan dimana realisasi pada tahun 2022 sebesar 79,46. Hal tersebut menunjukkan kinerja pegawai BRPPUPP selama tahun 2023 sangat baik serta terjadi peningkatan kompetensi yang didapatkan melalui diklat dan seminar, sehingga jika disimpulkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRPPUPP di tahun 2023 mengalami peningkatan dan diharapkan dapat terus meningkat di tahun yang akan datang.

IKU ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BRSDM KP, dimana capaian kinerja BRPPUPP dalam penilaian indeks profesionalisme Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusat Riset Perikanan. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 72.582.864 (98,81%) dengan pagu Rp 73.454.000

Capaian nilai indeks profesionalisme satker lingkup Puriskan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Sekretariat BRSDM	81	87.93	108,55%
2	Pusat Riset Kelautan	78	91.24	116,97%
3	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	78	88.68	113,69%
4	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	78	87.88	112,66%
5	Pusat Riset Perikanan	78	90.77	116,37%
6	Balai Riset Perikanan Laut	78	89.57	114,83%
7	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	78	87.65	112,37%
8	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	80	91.6	114,5%
9	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	78	82.71	106,03%
10	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	78	86.1	110,38%
11	Balai Riset Pemuliaan Ikan	78	89.37	114,57%

Indikator Kinerja 12

Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)

Definisi IKU ini yaitu Nilai PM SAKIP Level III BRSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BRSDM. Unit Kerja level III lingkup BRSDM terdiri Sekretariat BRSDM, Pusat Riset Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Dengan cara perhitungan:

Nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BRSDM, Kategori nilai PM SAKIP Level II lingkup BRSDM yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Bukti data dukungnya berupa:

- (1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen.
- (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BRSDM

Tabel 27. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 12	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	76	81,15	106,78	-	76	106,78	-	-

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP memiliki realisasi sebesar 81,15 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 76. Persentase dari capaian IKU ini yaitu sebesar 106,78 hal ini menunjukkan bahwa nilai Penilaian Mandiri sakip telah melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2023. Penilaian Mandiri SAKIP dilakukan dengan berpedoman pada Permen KP Nomor 68 Tahun 2017 dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 dengan melakukan verifikasi bukti dukung yaitu Pemenuhan dokumen SAKIP meliputi dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal kemudian dilakukan pengisian hasil penilaian mandiri SAKIP pada aplikasi DSMS BPPSDM.

Nilai SAKIP BRPPUPP TA 2023 berdasarkan penilaian mandiri yaitu sebesar 81,15. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari nilai SAKIP secara mandiri tersebut termasuk ke dalam kategori A (Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.). Hasil penilaian SAKIP dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 28. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP TA 2023

No	Komponen	Nilai	Hasil evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	25,20	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja setidaknya 5 tahun terakhir 2. Kualitas seluruh kriteria terpenuhi, terdapat upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut misalnya melalui penyediaan bukti	1. Penyediaan dokumen dan pelaksanaan perencanaan kinerja untuk lebih terorganisir dan informatif

No	Komponen	Nilai	Hasil evaluasi	Rekomendasi
			dukung berupa kertas kerja	
2	Pengukuran Kinerja	25,20	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen pengukuran kinerja setidaknya 5 tahun terakhir; 2. Kualitas seluruh kriteria terpenuhi, terdapat upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut misalnya melalui penyediaan bukti dukung berupa kertas kerja	1. Penyediaan dokumen dan pelaksanaan pengukuran kinerja untuk lebih terorganisir dan informatif
3.	Pelaporan Kinerja	12,00	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen pelaporan kinerja setidaknya 5 tahun terakhir, namun reviu dokuem LKj hanya tersedia tahun 2022; 2. Kualitas seluruh kriteria terpenuhi, terdapat upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut misalnya melalui penyediaan bukti dukung berupa kertas kerja dan Sudah menampilkan perbandingan realisasi kinerja antar Balai Riset lingkup Pusat Riset Perikanan, namun belum mengungkap perbandingan di level kementerian/nasional/internasional (benchmark kinerja)	1. Penyediaan dokumen dan pelaksanaan pelaporan kinerja yang lebih terorganisir dan informatif, dan berkoordinasi dengan Pusat untuk mengagendakan reviu LKJ setiap tahun secara rutin dan berjenjang, serta menampilkan LKj yang menampilkan perbandingan realisasi kinerja di level kementerian/nasional/internasional
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internl	18,75	1. Apresiasi atas ketersediaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal setidaknya 1 tahun terakhir 2. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja namun belum optimal terutama dalam keterlibatan SDM. 3. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	1. Penyediaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang lebih terorganisir dan informatif 2. Mengoptimalkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja terutama dalam keterlibatan SDM. 3. Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
Total Nilai		81,15		
Predikat		A		

Dokumentasi Kegiatan Penilaian SAKIP :



IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPU-PP (nilai) ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BRSDM KP, dimana capaian kinerja BRPPUPP dalam penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup BPPSDMKP. Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup BPPSDMKP BRPPUPP mencapai urutan ke duapuluh tiga dari tigapuluh tujuh satker lingkup BPPSDM KP. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP satker lingkup BPPSDMKP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Satker	Target IKU	Hasil Penilaian Mandiri		Keterangan
			Nilai	Predikat	
1.	BPPP Ambon	75,00	82,45	A	Target IKU Tercapai
2.	BPPP Medan	75,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
3.	BPPP Bitung	77,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
4.	BBRBLPP Gondol	77,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
5.	BRBIH Depok	80,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
6.	Politeknik KP Dumai	80,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
7.	Politeknik AUP	80,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
8.	Politeknik KP Jembrana	80,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
9.	Politeknik KP Sidoarjo	80,00	82,25	A	Target IKU Tercapai
10.	LRMPHP Bantul	77,00	82,00	A	Target IKU Tercapai
11.	BDA Sukamandi	75,00	82,00	A	Target IKU Tercapai
12.	LRSDKP Bungus	79,00	81,80	A	Target IKU Tercapai
13.	BRPI Sukamandi	80,00	81,80	A	Target IKU Tercapai
14.	Politeknik KP Bone	80,00	81,80	A	Target IKU Tercapai
15.	BPPP Banyuwangi	77,00	81,50	A	Target IKU Tercapai
16.	SUPM Kota Agung	80,00	81,50	A	Target IKU Tercapai
17.	Politeknik KP Karawang	80,00	81,35	A	Target IKU Tercapai
18.	BPPP Tegal	70,00	81,20	A	Target IKU Tercapai
19.	BRPL Ancol	76,00	81,20	A	Target IKU Tercapai
20.	BRPSDI Jatiluhur	78,00	81,20	A	Target IKU Tercapai
21.	BRPBATPP Bogor	80,50	81,20	A	Target IKU Tercapai
22.	SUPM Ladang	80,00	81,20	A	Target IKU Tercapai
23.	BRPPUPP Palembang	76,00	81,15	A	Target IKU Tercapai
24.	SUPM Pontianak	80,00	80,80	A	Target IKU Tercapai
25.	LRPT Benoa	76,00	80,75	A	Target IKU Tercapai
26.	BRPBAPPP Maros	78,00	80,75	A	Target IKU Tercapai
27.	Politeknik KP Pangandaran	80,00	80,75	A	Target IKU Tercapai
28.	LRBRL Gorontalo	76,00	80,50	A	Target IKU Tercapai
29.	Politeknik KP Bitung	80,00	80,20	A	Target IKU Tercapai
30.	AK Wakatobi	80,00	80,15	A	Target IKU Tercapai
31.	SUPM Pariaman	80,00	80,15	A	Target IKU Tercapai
32.	SUPM Waeharu	80,00	80,15	A	Target IKU Tercapai
33.	LPTK Wakatobi	75,00	80,05	A	Target IKU Tercapai
34.	SUPM Tegal	80,00	80,00	BB	Target IKU Tercapai
35.	SUPM Sorong	80,00	80,00	BB	Target IKU Tercapai
36.	Politeknik KP Kupang	80,00	78,90	BB	Target IKU Tidak Tercapai
37.	Politeknik KP Sorong	80,00	71,40	BB	Target IKU Tidak Tercapai

Dukungan anggaran untuk IKU 12 sebesar Rp.30.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 27.587.302 (91,96%).

Indikator Kinerja 13

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK

A. Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi :

PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW IV

Jenis Dokumen yang dibutuhkan		Keterangan
1	Perjanjian Kinerja*	Revisi terakhir jika ada
2	Manual IKU	Revisi terakhir jika ada
3	Rincian Target IKU*	Revisi terakhir jika ada
4	Rencana Aksi*	Khusus level 2
5	LKJ/LCK Triwulan I*	LCK bisa diambil pada aplikasi kinerjaku
6	LKJ/LCK Triwulan II*	
7	LKJ/LCK Triwulan III*	
8	Data dukung LKJ/LCK Tw III	Cek per IKU

Keterangan:
* Dokumen ditandatangani

Nilai Aspek Kepatuhan = Bobot 30% X Nilai total dokumen

Nilai Total Dokumen = $\frac{\text{dokumen yang ada}}{\text{total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$

Contoh perhitungan:

Dokumen yang ada hanya bisa dilengkapi 7 dokumen

Nilai total dokumen = $(7 / 8) \times 100 = 87,5$

Nilai aspek kepatuhan = $30\% \times 87,5 = 26,25$

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kepatuhan sebesar 26,25

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data

Kesesuaian Data dan Informasi		Kesesuaian Target		Kesesuaian Realisasi	
Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max
PK ↓ Manual IKU	1 (A)	PK ↓ LKJ/LCK TW III	1 (E)	LKJ/LCK TW III ↓ Kinerjaku	1 (H)
PK ↓ Rincian Target IKU	1 (B)	PK ↓ Kinerjaku	1 (F)		
PK ↓ Rencana Aksi	1 (C)	LKJ/LCK TW III ↓ Kinerjaku	1 (G)		
Rincian Target ↓ Kinerjaku	1 (D)				

Nilai Aspek Kesesuaian = Bobot 30% X Rata-rata Kesesuaian

Rata-rata Kesesuaian = $\frac{A+B+C+D+E+F+G+H}{8} \times 100$

Contoh perhitungan:

Nilai perbandingan (A-H) yang diperoleh mendapat skor 7,8

Rata-rata kesesuaian = $(7,8 / 8) \times 100 = 97,5$

Nilai aspek kesesuaian = $30\% \times 97,5 = 29,25$

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kesesuaian sebesar 29,25

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku.

Nilai Capaian IKU + IK Tw I	Nilai Capaian IKU + IK Tw II	Nilai Capaian IKU + IK Tw III	Nilai Aspek Ketercapaian = Bobot $40\% \left(\frac{\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK}}{120} \times 100 \right)$
99,00 (A)	102,00 (B)	103,00 (C)	$\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK} = \frac{A+B+C}{3} \times 100$

Contoh perhitungan:

Nilai Capaian IKU + IK yang diperoleh Tw I: 99, Tw II: 102, Tw III: 103

Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK = $(99+102+103) / 3 = 101,33$

Nilai aspek ketercapaian = $40\% \times ((101,33 / 120) \times 100) = 33,78$

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek ketercapaian sebesar 33,78

- B. **Nilai Rekon Kinerja** adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

ASPEK KEPATUHAN (30%)	ASPEK KESESUAIAN (30%)	ASPEK KETERCAPAIAN (40%)
A-I	A-II	A-III
SKOR NILAI UNIT = A-I + A-II + A-III = XX,XX		

SKALA	
0 - 50	BURUK
>50 - 75	KURANG
>75 - 85	CUKUP
>85 - 90	BAIK
>90 - 100	SANGAT BAIK

Tabel 29. Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 13	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
97,04	93	94,81	101,95	-2,29	93	101,95	-	-

Untuk indikator nilai rekonsiliasi memperoleh capaian di tahun 2023 sebesar 94,81 dengan target sebesar 93. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat penurunan sebesar 2,29% dari capaian tahun sebelumnya yaitu 97,04. Walaupun demikian, capaian tahun 2023 tetap melebihi target yang telah ditentukan dan memiliki persentase capaian sebesar 101,95%. Indikator Rekonsiliasi Kinerja dikembangkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 35.726.925 (83,02%) dengan pagu Rp 43.035.000

IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai) ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BRSDM KP, dimana capaian kinerja BRPPUPP dalam penilaian Rekonsiliasi Kinerja Tahun 2023 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup BRSDMKP. Capaian nilai rekonsiliasi kinerja satker lingkup Puriskan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT BRSDM Tahun 2023

No	Nama Satker	Hasil Penilaian Awal
1	LPTK Wakatobi	96,20
2	LRSDKP Bungus	95,38
3	BBRBLPP Gondol	92,67
4	BRPPUPP Palembang	94,81
5	BRPI Sukamandi	97,88
6	BRPBATPP Bogor	97,83
7	BRPBAPPP Maros	95,61
8	BRPSDI Jatiluhur	94,51
9	BRPL Ancol	95,98
10	BRBIH Depok	95,83
11	LRBRL Gorontalo	96,18
12	LRMPHP Bantul	96,34
13	LRPT Benoa	93,56
14	Poltek AUP	93,95
15	Poltek KP Sidoarjo	95,97
16	Poltek KP Sorong	96,42
17	Poltek KP Bitung	97,24
18	Poltek KP Karawang	97,75
19	Poltek KP Pangandaran	96,69
20	Poltek KP Kupang	96,60
21	Poltek KP Jembrana	96,72
22	Poltek KP Bone	95,16
23	Poltek KP Dumai	98,47
24	AK Wakatobi	92,11
25	SUPM Pontianak	95,83
26	SUPM Pariaman	95,89
27	SUPM Ambon	97,24
28	SUPM Sorong	97,06
29	SUPM Kota Agung	96,05
30	SUPM Tegal	95,61
31	SUPM Ladong Aceh	96,63
32	BDA Sukamandi	92,72
33	BPPP Medan	98,36
34	BPPP Tegal	94,00
35	BPPP Banyuwangi	95,69
36	BPPP Bitung	93,98
37	BPPP Ambon	96,61

Indikator Kinerja 14

Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem manajemen pengetahuan yang dimaksud dalam IKU ini adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pemanfaatan teknologi informasi ini dinilai berdasarkan pemanfaatan aplikasi Bitrix 24 KKP dalam menyampaikan informasi berupa berita ataupun laporan kegiatan terkait riset maupun non riset. Pada Tahun 2023 IKU ini ditargetkan sebesar 92%.

IKU ini memiliki pengertian suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Tabel 30. Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 14	Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
100	92	116,67	120	16,67	92	116,67	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 ini capaian indikator kinerja presentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan memiliki presentase capaian sebesar 120% yang mana dengan angka tersebut menunjukan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu besar capaian 116,67% dengan target 92. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKU ini mengalami peningkatan sebanyak 16,67% dimana realisasi di tahun 2022 hanya sebesar 100%.

IKU Manajemen Pengetahuan ini menggunakan platform portal Collaboration Office (<https://portal.kkp.go.id>). Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini dapat dikarenakan pengguna aplikasi Coofis telah menunjukkan keaktifan dalam melakukan posting atau sharing dan informasi dan kegiatan sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

IKU Persentase Unit Kerja BRPPU-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BRSDM KP, dimana capaian kinerja BRPPUPP dalam penilaian Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2023 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusat Riset Perikanan. Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Puriskan, BBRBLPP memiliki capaian yang sama dengan sebelas satker lingkup Pusat Riset Perikanan. Capaian nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker lingkup Puriskan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 31 berikut.

Tabel 31. Capaian Nilai Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup Pusrisikan

No	Nama Satker	Nilai Akhir Tahun
1	BRPPUPP Palembang	116.67%
2	BRPBAPPP Maros	116.67%
3	BRBPATPP Bogor	116.67%
4	BBRBLPP Gondol	116.67%
5	BRBIH Depok	116.67%
6	BRPL Jakarta	116.67%
7	BRPSDI Jatiluhur	116.67%
8	BRPI Sukamandi	116.67%
9	LRPT Denpasar	108.33%
10	LRBRL Gorontalo	116.67%
11	LRMPHP Bantul	116.67%

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 28.273.421 (93,86%) dengan pagu Rp 30.124.000

Indikator Kinerja 15

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)

Definisi IKU ini yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon III lingkup BRSDM.

Bukti data dukungnya berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BRSDM KP.

Tabel 32. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPU-PP (%)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	80	80	100	-	80	100	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 ini capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan(%) memiliki presentase capaian sebesar 100% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 80.

Capaian IKU ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d 31 Maret 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember 2023. Capaian IKU sebesar 80% menunjukkan bahwa BRPPUPP tidak memiliki temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran triwulan IV, sehingga capaian IKU sesuai target capaian.

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan BRPPUPP merupakan indikator baru BRPPUPP sehingga indikator berikut tidak dibandingkan dengan capaian di tahun 2022. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 43.465.570 (94,22%) dengan pagu Rp 46.130.000

Indikator Kinerja 16

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Tabel 33. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPU-PP (nilai)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
95,76	93,75	95,60	101,97	-0,16	93,75	101,97	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRPPUPP sebesar 95,60 yang mana angka tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 93,75. Maka persentase capaian yang didapat yaitu 101,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian di periode yang sama tahun 2022, telah terjadi penurunan sebesar 0,16% dimana realisasi tahun sebelumnya berada di angka 95,66. Penarikan data capaian IKU IKPA triwulan IV tahun 2023 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 20.005.767 (90,47%) dengan pagu sebesar Rp 22.112.000

Indikator Kinerja 17

Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)

Definisi IKU ini adalah Nilai serapan anggaran di tahun berjalan Berdasarkan target penyerapan anggaran tiap triwulan dengan formulasi sebagai berikut:

- Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah
- Target penyerapan tahun 2023 yakni 81%
- Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif
- Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

Bukti capaian IKU ini berupa Laporan Hasil pengolahan data pada aplikasi SMART DJA berupa Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP pada akhir tahun.

Tabel 34. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 16	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
87,10	82	86,46	105,44	-0,73	82	105,44	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Nilai NKA BRPPU-PP (nilai) sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai sebesar 86,46, dimana angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan presentase capaian sebesar 105,44%. data diperoleh melalui aplikasi smart DJA capaian pada akhir tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi yang diperoleh adalah 87,10 sehingga angka tersebut menunjukkan terjadinya

penurunan capaian Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP di tahun 2023 sebesar 0,73%. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 216.137.707 (99,91%) dengan pagu sebesar Rp 216.338.000

Indikator Kinerja 18

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)

Definisi iku ini yaitu Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPPU-PP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja BRPPU-PP.

Dasar Hukum:

PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP

PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN

Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

Bukti data dukungnya yaitu berupa:

- 1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa , Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll
- 2. Laporan Kegiatan Kemitraan

Tabel 35. Capaian IKU Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 18	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
1	3	4	120	300	3	120	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan) memiliki target sebanyak 1 kemitraan dan capaian di Tahun 2023 terdapat 4 kemitraan sehingga memiliki persentase capaian sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 300% dari jumlah kesepakatan di tahun tersebut yaitu 1 kesepakatan.

Kerja sama yang terbangun dilakukan melalui beberapa mekanisme yakni :

1) **2 Universitas : Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan.**

Peran perguruan tinggi selalu terkoneksi dengan triangle academic yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

i. **Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Dalam praktiknya selama 1 (satu) tahun, goals yang ingin dicapai mencakup optimalisasi pemanfaatan aset (kolam SPECTRA, laboratorium, Instalasi Mariana, dan Instalasi Patra Tani) melalui magang/kerja praktek dan kuliah kerja lapang, pemanfaatan keahlian pakar di bidang perikanan dan kelautan melalui keterlibatan Instruktur dan/atau Analis Kebijakan sebagai dosen pembimbing dan dosen praktisi/tamu, kolaborasi publikasi serta pendampingan dari mitra terkait sertifikasi produk halal terhadap UMKM binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPPUPP.

ii. **Universitas Terbuka**

Partisipasi UT dalam kerja sama ini menyoroti komitmen bersama dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkesinambungan. Melalui metode pembelajaran jarak jauh, BRPPUPP dan UT merancang inisiatif untuk mempermudah akses pendidikan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yaitu Penyuluh Perikanan Satminkal BRPPUPP yang meliputi 5 provinsi (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). Selama 3 (tiga) tahun ke depan, BRPPUPP menjalin kerja sama dengan Universitas Terbuka melalui kekhususan Program Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan dan Jenjang Pascasarjana (S2) melalui kekhususan Program Magister Ilmu

Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP), serta berkolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2) **Sewa Menyewa Tanah oleh PT Dizamatra Powerindo**

Landasan pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dengan PT Dizamatra Powerindo yakni Surat Keputusan MENKP RI Nomor 778/KEPMEN-KP/SJ/PL.720/2023.

Berdasarkan Surat Persetujuan Sewa BMN dari Menteri Keuangan RI Nomor S-172/MK.6/KNL.0402/2023 ditetapkan bahwa sebagian tanah dengan total luas 7.500 m², terletak di Kelurahan Patratani, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dimanfaatkan sebagai jalan hauling batubara untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3) **Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Dizamatra Powerindo**

Peran PT. Dizamatra Powerindo dalam kerja sama ini membawa dimensi tanggung jawab sosial perusahaan serta pengelolaan lahan pada Instalasi BRPPUPP yang berlokasi di Patra Tani, Kabupaten Muara Enim. Melalui CSR yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, kerja sama ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan lahan dan revitalisasi lahan mendukung pengembangan Special Area For Conservation and Fish Refugia (SPEECTRA) meliputi pengerasan jalan, perbaikan 22 unit kolam budidaya serta pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih.

Kemitraan yang terbentuk tentu mendukung pelaksanaan program prioritas BPPSDM KP yang dijalankan BRPPUPP diantaranya Smart Fisheries Village (SFV) Konservasi Ikan Lokal Perairan Umum dan Eduwisata yang berlokasi di Instalasi Perikanan Rawa Pasang Surut - Patra Tani serta Smart Fisheries Village (SFV) Budidaya Ikan Patin Perkasa di Instalasi Plasma Nutfah – Mariana.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 15.921.500 (96,37%) dengan pagu sebesar Rp 16.619.000

Indikator Kinerja 19

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP(%)

Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPPUPP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

- Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Formula :

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Hasil Layanan}}{\text{Jumlah Target Dokumen Hasil Layanan}} \times 100\%$$

Tabel 36. Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP(%)

SS 5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 19	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP (%)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024

100	100	100	100	0	100	100	-	-
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	---

Untuk indikator ini, realisasi yang dicapai pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan jumlah target yang sama. Sehingga persentase capaian yang didapatpun sebesar 100%.

Perolehan capaian indikator berikut dikarenakan kelengkapan dokumen pendukung yang telah tersusun di Triwulan IV tersedia sesuai dengan target sehingga persentase capaian untuk indikator berikut sebesar 100%.

Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP (%) ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satker lain lingkup Pusat Riset Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Perbandingan Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP (%) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 14.192.361.588 (96,37%) dengan pagu sebesar Rp 14.726.656.000

Indikator Kinerja 20

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran d. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

- e. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- f. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Formula :

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Hasil Layanan}}{\text{Jumlah Target Dokumen Hasil Layanan}} \times 100\%$$

Tabel 38. Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker							
IKU 20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)							
Realisasi TAHUN 2022	TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
100	100	100	100	-	100	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas persentase layanan dukungan manajemen internal BRPPUPP sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai realisasi sebesar 100% dimana angka tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian dokumen layanan dukungan manajemen yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll. pada Tahun 2023 telah terpenuhi sehingga memperoleh persentase sebesar 100%.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 54.210.205.726 (98,80%) dengan pagu sebesar Rp 54.867.561.000

Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satker lain lingkup Pusat Riset Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Perbandingan Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPU-PP (%) dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	100	100

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BRPPUPP sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 40. Realisasi Anggaran BRPPUPP Tahun 2023

KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI	%
2375	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		9.942.617.000	9.906.451.027	99,64
2375.QJA.001	Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji Kelayakannya	3 Produk	1.500.000.000	1.493.526.435	99,57
2375.QDD.001	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dari penyuluh KP	5.600 Kelompok	7.908.460.000	7.872.407.480	99,54
2375.QDD.002	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan percontohan penyuluhan	1 produk	500,000,000	499.181.612	99,83
2375.RAL.001	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP	1 unit	11,100,000	11,100,000	100
2375.RBQ.001	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	23,057,000	23,000,000	99.75
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup		70,248,329,000	69.037.428.768	98,28

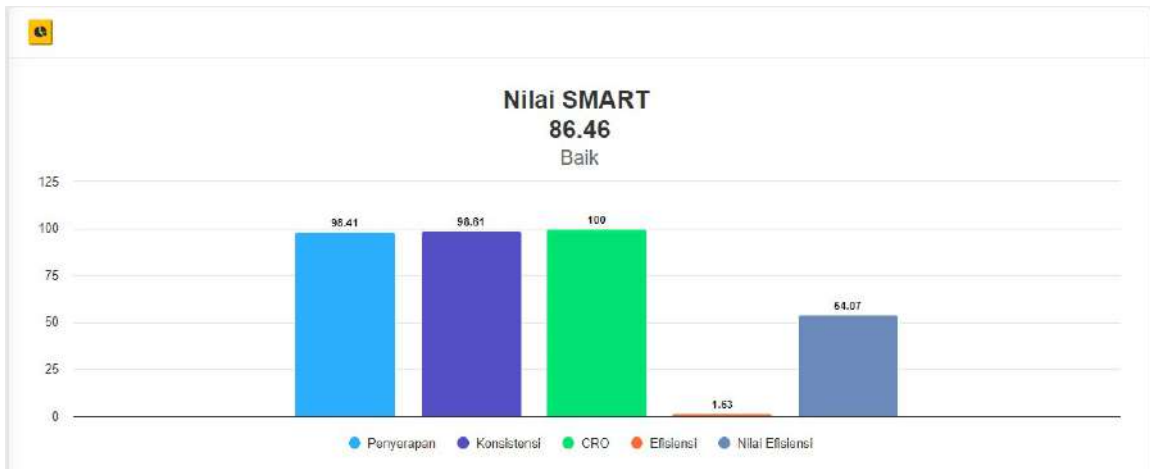
KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI	%
	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
2378.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	22.112.000	20.005.767	90,47
2378.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	46.743.000	44.194.921	94,55
2378.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	335.824.000	332.558.391	99,03
2378.EAA.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	69.554.565.000	68.369.387.445	98,30
2378.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	53 Orang	73.340.000	72.545.364	98,92
2378.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	82.035.000	72.526.365	88,41
2378.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	103.710.000	98.623.213	95,10
2378.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	30.000.000	27.587.302	91,96
	TOTAL		80,190,946,000	78.943.879.795	98,44

Sumber : data realisasi, aplikasi SAKTI per tgl 31 Desember 2023

3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Tahun 2023

Efisiensi adalah cara untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga (sumberdaya manusia) dan biaya (anggaran). Suatu pekerjaan dinilai efisien apabila sumber daya (input) yang digunakan sedikit, namun mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan rencana atau harapan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi, data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA dimana pengisian aplikasi ini dilakukan secara simultan setiap awal bulan.



Gambar 6. Nilai Efisiensi BRPPUPP pada aplikasi SMART DJA

Tabel 41. Efisiensi Anggaran BRPPUPP Tahun 2023

Capaian Realisasi Output	Serapan Anggaran	Konsistensi Serapan Anggaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi
100	98,41	98,61	1,63	54,07

Berdasarkan gambar dan tabel diatas, Efisiensi anggaran BRPPUPP pada Tahun 2023 memperoleh skor 1,63 dengan Nilai Efisiensi sebesar 54,07. Efisiensi anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20. Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 100%, seperti:
 - A. Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP sebesar 112,53%
 - B. Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPPUPP sebesar 100,59%
 - C. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP sebesar 104,23%
 - D. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di satminkal BRPPUPP sebesar 111,47%
 - E. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP sebesar 101,03%
 - F. Nilai PNBP BRPPU-PP sebesar 120%
 - G. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPU-PP (%)sebesar 120%

- H. Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP sebesar 112,37%
- I. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP sebesar 106,78%
- J. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP sebesar 101,95%
- K. Persentase unit kerja BRPPUPP sebesar 120%
- L. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP sebesar 101,97%
- M. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP sebesar 105,44%
- N. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPUPP sebesar 120%

Pencapaian nilai efisiensi 1,63 menunjukkan dampak dari penyerapan anggaran yang cukup maksimal. Tentu saja kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di triwulan berikutnya hingga diakhir tahun sehingga capaian kinerja pada akhir tahun dapat tercapai.

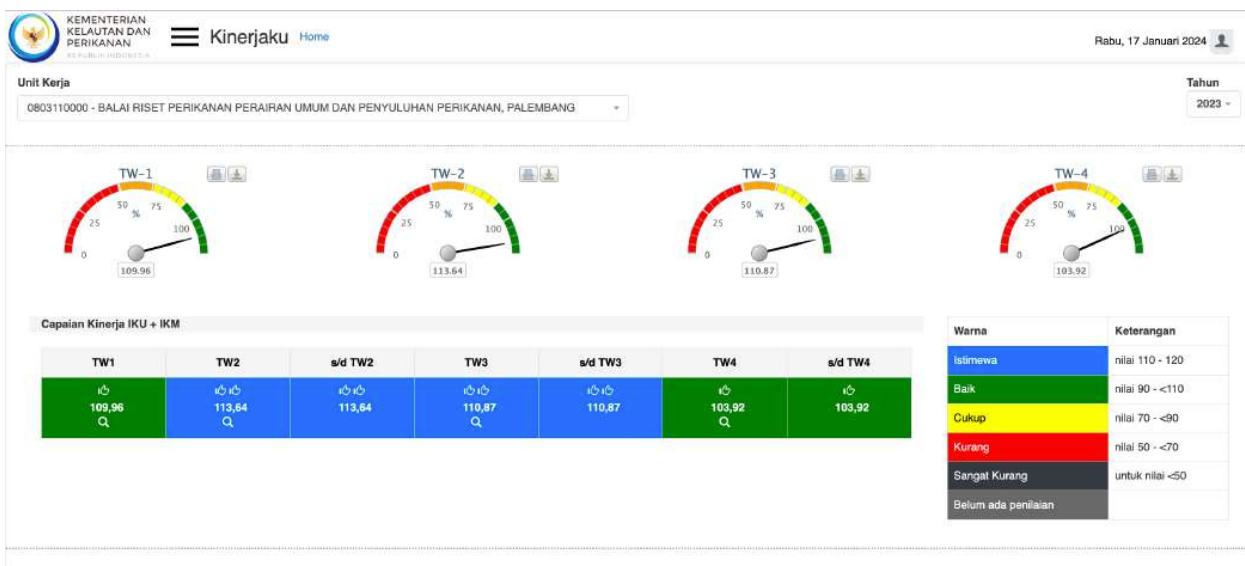
BAB IV PENUTUP

01 — Capaian Kinerja Utama

02 — Permasalahan dan Rekomendasi

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2023 sebesar 103,92%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 7. Dashbord Kinerja Tahun 2023 BRPPUPP

Pada Tahun 2023 dari 20 IKU BRPPUPP telah mencapai target sehingga berstatus hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPPUPP tercapai sebanyak 5633 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 5600 kelompok dengan persentase sebesar 100,59%
2. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 271 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 260 kelompok dengan persentase sebesar 104,23%
3. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 554 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 497 kelompok dengan persentase sebesar 111,47%

4. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang) tercapai sebanyak 1079 orang dari target Tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 1068 orang dengan persentase sebesar 101,03%
5. Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BRPPUPP (Desa Perikanan Cerdas) (Desa) tercapai sesuai dengan target Tahun 2023 yaitu 2 Desa dengan persentase sebesar 100%
6. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 2 Kelompok sesuai dengan target Tahun 2023 dengan persentase sebesar 100%
7. Sarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit) tercapai sebanyak 1 Unit sesuai dengan target tahun 2023 dengan persentase sebesar 100%
8. Prasarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit) tercapai sebanyak 1 Unit sesuai dengan target tahun 2023 dengan persentase sebesar 100%
9. Nilai PNBK BRPPU-PP (Rupiah Miliar) dengan capaian di Tahun 2023 sebesar 0,197 Rupiah Miliar dengan target yang ditetapkan sebanyak 0,047 Rupiah Miliar dengan persentase sebesar 120%
10. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPPU-PP (%) memiliki capaian 0% dari target Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 0,5 % dengan persentase 120%
11. Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP tercapai sebesar 87,65 dengan target tahun 2023 sebesar 78 dan persentase sebesar 112,37%
12. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP tercapai dengan nilai 81,15 dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 76 dengan persentase sebesar 106,78%
13. Nilai Rekonsiliasi tercapai dengan nilai 94,81 kelompok dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 93 dengan persentase sebesar 101,95%
14. Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai sebesar 116,67% dengan target Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 92% dengan persentase sebesar 120%

15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%) dengan capaian sebesar 80% sesuai dengan target yang ditentukan dan persentase sebesar 100%
16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai) tercapai sebesar 95,60 dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 93,75 dengan persentase sebesar 101,97%
17. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP tercapai sebesar 86,46 dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 82 dengan persentase sebesar 105,44%
18. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPUPP (kemitraan) tercapai sebanyak 4 kemitraan dari target Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 3 kemitraan dengan persentase sebesar 120%
19. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
20. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2023 yaitu:

1. Pencapaian IKU Kelompok yang disuluh, masih terdapat penyuluh yang belum melampirkan dan menyampaikan bukti dukung seperti Berita Acara dan SK.
2. IKU Kelompok yang ditingkatkan belum meningkat banyak di triwulan III, kemungkinan akan naik di triwulan selanjutnya
3. Terdapat kendala dalam peningkatan kelas kelompok, kelompok yang kelasnya sudah madya cenderung tidak ingin ditingkatkan ke Utama dikarenakan akan dianggap telah mandiri sehingga tidak akan mendapat bantuan.

Secara umum Kinerja BRPPUPP pada Triwulan III tahun 2024 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Menerapkan komitmen Bersama dalam pemenuhan bukti dukung pencapaian IKU dan dokumen administrasi lainnya.

2. Tim Penyuluhan melakukan inventarisir kerkait bakal kelompok yang akan ditingkatkan seperti apa, dan memproyeksikan kelompok yang akan di kalim sebagai output
3. Menyampaikan aturan yang dibuat dinas terkait pemberian bantuan, sehingga aturan bisa disampaikan ke Pusat untuk ditindak lanjuti jikalau target belum terpenuhi.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PK BRPPUPP-PUSRISKAN 10 Januari Tahun 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Antoni S

Jabatan : Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Yayan Hikmayani

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kesatu akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan


Yayan Hikmayani


Rezki Antoni S

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1 Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Milyar)	0,027
		2 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)	≤0,5
		3 Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)	78
		4 Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76
		5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	92
		6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPPU-PP (%)	92
		7 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8 Nilai IKPA BRPPU-PP (nilai)	89
		9 Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)	82
		10 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	1
		11 Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.124.592.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023		15.124.592.000

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Kesatu
Pjt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan


Rezki Antoni S



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : **Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5.600
		2	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	250
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	306
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1.068
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	4
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9.908.460.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	55.123.737.000
Total Anggaran Penyuluhan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		65.032.197.000

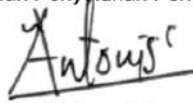
Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan



Lilly Aprilia Pregiawati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kesatu akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Juni 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan


Yayan Hikmayani


Rezki Antoni S

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNPB BRPPU-PP (Rupiah Milyar)	0,027
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)	≤0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)	78
		4	Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	92
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPPU-PP (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8	Nilai IKPA BRPPU-PP (nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	1
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPU-PP (%)	100

Data Anggaran

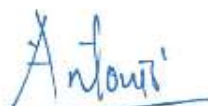
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.124.592.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023		15.124.592.000

Jakarta, 27 Juni 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan


Yayan Hikmayani


Rezeki Antoni S



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : **Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset
Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5.600
		2	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	250
		3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	306
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1.068
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	4
3	Tersedianya Sarana dan Prasanana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Sarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1
		7	Prasarana Pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar lingkup BRPPUPP (unit)	1
4	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	8	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9.942.617.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	55.123.737.000
Total Anggaran Penyuluhan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		65.066.354.000

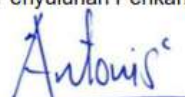
Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset
Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 00, JAKABARING-PALEMBANG

TELEPON: (0711) 5049600 FAKSIMILE (0711) 5469601

LAMAN: www.bk3ipalembang.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK: persurafanbrppupp@kkn.go.id

SURAT PERINTAH

**PLT. KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

NOMOR : B.106/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2023

TENTANG

TIM PENGELOLAAN KINERJA

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Institusi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);

MEMBERI PERINTAH

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;
- KEDUA : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

Tim Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Pelaksana
 1. Ketua:
Memimpin Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 2. Manajer Kinerja:
Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;
 3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa:
 - a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. Indikator Kinerja:
 - 1) Digunakan sebagai ukuran kinerja formal;

- 2) Indikator kinerja eselon III telah selaras dengan IKU Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
 - 4) Ditetapkan dengan Surat Perintah Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
- c. Dokumen Kontrak Kinerja:
- 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - a) Tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Peta Strategis;
 - 3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 4) Inisiatif Strategis/Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi:
- a. Menyusun pedoman/mechanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran/ tahunan);

- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi;
 - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - k. Menyusun laporan nilai evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - n. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - q. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
 - r. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
 - s. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
5. Sub-Tim Kinerja Pegawai:
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;

- c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

- KETIGA** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Riset Perikanan;
- KELIMA** : Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 18 Januari 2023
Kepala Balai Riset Perikanan
Perairan Umum dan Penyuluhan



Antoni
Rezki Antoni S, S.Kel
NIP. 19850619 201012 1 001

Lampiran : Surat Perintah Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan
Nomor : B.106/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2023
Tanggal : 18 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengarah : Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan

Penanggung Jawab :

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Manajer Teknis		
1.	Rezki Antoni S	Manajer
2.	Rully Ismanto	Manajer
3.	Sri Mulyani	Manajer
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Acim Tirtana	Perencana
2.	Rezki Antoni S	Perencana
Sub Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi		
1.	Muthia Nurlestari Putri	Pelaksana
2.	Arismansyah	Pelaksana

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 18 Januari 2023
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan
Perairan Umum dan Penyuluhan
Perikanan



Rezki Antoni S
Rezki Antoni S, S.Kel
NIP. 19850619 201012 1 001



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**
REPUBLIK INDONESIA

BRPPUPP - PALEMBANG

-  (0711) 5649600
-  Jl. Gub. H. Bastari No 8, Jakabaring, Palembang
-  brppupp_palembang
-  www.bp3upalembang.kkp.go.id